

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :  
JOSUA M. SIRAIT  
NPM : 0771010054

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2011

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpah rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini disusun guna memenuhi tuntunan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I sekaligus dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap peneliti.
3. Bapak Ec. Gendut Sukarno,MS selaku Wadek II.
4. Bapak Subani SH, MSi, selaku Dosen Wali Peneliti.
5. Ibu Yana Indawati, SH.M,Kn selaku dosen pembimbing pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan peneliti.

6. Bapak dan Ibu dosen Bapak Eko Wahyudi, SH.,MH, Bapak Fauzul Aliwarman. SH, M.Hum selaku Sekprogdi Fakultas Hukum, Ibu Wiwin Yulianingsih, SH.M.Kn, Ibu Mas Anienda T.F., SH., MH.
7. Para Staf tata usaha fakultas hukum Bapak Tukhid, Bapak Sariyanto. S.Sos, Ibu Suwarsih, S.Sos, Ibu Dahlia. T. SE, Ibu Hendrayana. S.Sos yang telah membantu peneliti.
8. Para Narasumber Bpk. Ronius, SH dan Bpk Gazalba Saleh, SH. MH serta para Staf Pengadilan Tipikor Bpk. Abdullah, Ibu Yuliana, dan beberapa Staf lain yang tidak dapat peneliti sebutkan.
9. Kedua orang tua, yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kekasih saya yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi tersebut.
10. Sahabatku, Dwek, Pesek, Curut, Po'6, Bang Harick, Ardhan, Soebier, Zendhok, C-Mon si Katrok, Basuki, Gaswat, Pleki, Rosied, Aldo, Ade, Abu, Wisma, Oky, Miko, Fian dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu peneliti meminta maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama, dll. Maka dari itu saran dan kritik sangatlah peneliti harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya, sehingga Skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, November 2011

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka.....	4
1.5.1 Pengertian Tindak Pidana.....	4
1.5.2 Unsur Tindak Pidana.....	5
1.5.3 Pembagian Tindak Pidana .....	8
1.6 Tindak Pidana Korupsi .....	8
1.6.1 Pengertian Korupsi .....	8
1.6.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	10
1.6.3 Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	12

1.7 Pelaku Tindak Pidana .....	14
1.8 Pengertian Budaya.....	16
1.8.1 Budaya Korupsi .....	17
1.8.2 Sejarah Perkembangan Korupsi.....	17
1.8.3 Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi .....	19
1.9 Upaya Penanggulangan Korupsi .....	21
1.10 Dampak Korupsi.....	23
1.11 Macam Tindak Pidana Korupsi.....	26
1.12 Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	31
1.13 Tugas Dan Wewenang KPK .....	32
1.14 Metode Penelitian .....	33
1.14.1 Pendekatan Masalah.....	33
1.14.2 Sumber Data .....	34
1.14.3 Pengumpulan Bahan dan Data.....	35
1.14.4 Metode Analisis Data.....	36
1.15 Sistematikan Penulisan .....	37

## BAB II FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI MENINGKATNYA KASUS KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Faktor Internal .....	40
2.2 Faktor Eksternal .....	41
2.3 Macam Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Ditangaani .....	43
2.3.1 Tabel Perkara.....	48

### BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN SANKSI BAGI

#### PELAKU KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN

#### TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1 Penerapan Hukum Bagi Pelaku Korupsi .....	52
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman.....	53
3.3 Macam Sanksi Yang Diberikan Hakim Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	56

### BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : JOSUA M. SIRAIT  
NPM : 0771010054  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juni 1988  
Program Studi : Strata1 (S1)  
Judul Skripsi :

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pengadilan Tipikor Surabaya dalam memberikan efek jera pada para pelaku-pelaku korupsi yang selama ini ditangani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh dari melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama ini pengadilan Tipikor Surabaya telah dengan sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan dakwaan yang serta perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sifat-sifat ketamakan dari para pelaku dengan tindak mempedulikan nasib para rakyat mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dari itu pengadilan tindak pidana korupsi melalui para hakim akan menindak dengan tegas para pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata Kunci : Faktor terjadinya korupsi, Fakta-fakta di persidangan, Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera parah pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.

Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan banyak cara, sedikit tidaknya dengan menyelewengkan dana yang dimana digunakan untuk keperluan Negara. Karena yang menjadi masalah utama korupsi tersebut adalah seiring dengan kemajuan kemakmuran dan juga teknologi.

Salah satu contoh tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam suatu negara atau dilakukan oleh para konglomerat yang melakukan

hubungan kerja sama dengan para pemegang kekuasaan. Kegiatan korupsi bukan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan siapa saja dan mempengaruhi beberapa aspek.

Korupsi bukan lagi dimasukkan dalam perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Maka dari itu undang-undang korupsi dan sistem peradilan nya pun sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana kinerja lembaga tersebut hampir serupa dengan lembaga-lembaga di bidang hukum pada umumnya yaitu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Bukan hanya itu saja undang-undang yang digunakan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi sendiri juga khusus, dimana guna undang-undang ini agar lebih menjerat atau membuat para pelaku korupsi lebih jera lagi.

Maka dari itu, para aparat penegak hukum harus bekerja dengan lebih lugas, lebih keras, serta teliti dalam memberantas segala bentuk tindakan yang mengandung unsur korupsi. Karena sekarang korupsi merupakan kejahatan yang berada di peringkat pertama kriminalitas yang sangat merugikan bangsa dan negara di negara kita ini. Jika kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal maka akan bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum, dan membiarkan para koruptor menjarah

kekayaan negara serta asset-aset penting negara merupakan pengkhianatan besar terhadap negara.

Budaya-budaya korupsi harus dengan cepat diberantas dari negara ini, maka dari itu setiap masyarakat harus mengerti akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Karena dari setiap tindakan korupsi maka akan merugikan banyak pihak. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga golongan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain dan banyak pihak.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan proposal skripsi yang diberi judul "UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA"

## 1.2 Rumusan masalah

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kasus korupsi di Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di Surabaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kerugian yang disebabkan dari tindak pidana korupsi serta memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Dan juga memberikan pengertian tentang dampak-dampak kerugian apa saja yang dapat ditimbulkan dari tindakan korupsi.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis semakin mengerti akan pengaruh negative dari tindak pidana korupsi dan penulis juga dapat memahami tata cara penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai masyarakat pada umumnya.

#### 1.5 Kajian Pustaka

##### 1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau

rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>1</sup>

#### 1.5.2 Unsur Tindak Pidana

Tidak ada sebab maka tidak ada akibat maka dari itu tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang maka tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat dengan KUHP) buku kesatu tentang aturan umum, yaitu : "Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 175.

Dari ketentuan perundang-undangan yang ada dapat kita tarik beberapa unsur tentang tindak pidana sebagai syarat agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mengandung peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  - a) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) Harus berlawanan dengan hukum.
  - c) Harus tersedia ancaman Hukumannya.<sup>2</sup>

Pengertiannya adalah :

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Peristiwa itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak bisa dipersalahkan pelakunya pun tidak

---

<sup>2</sup> Ibid hal 175

perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam ancaman darurat.

- a) Harus terbukti adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- b) Harus berlawanan dengan hukum, artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- c) Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu membuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

### 1.5.3 Tindak Pidana sendiri di bagi menjadi 2 bagian, Pidana umum dan Pidana Khusus :

1. Pidana umum : Hukum pidana yang berku umum.
2. Pidana khusus : Hukum pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana tertentu, contoh Tindak Pidana Korupsi.

## 1.6 Tindak Pidana Korupsi

### 1.6.1 Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi sebaga berikut :

”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”<sup>3</sup>

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa maam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

- 1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan,

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 5



sekali pun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

- 2) Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.

Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam

beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

- 3) Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

- 4) Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejut tujuan kelompok.

Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum<sup>4</sup>

#### 1.6.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,

---

<sup>4</sup> Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal -23

dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- Ø Perbuatan melawan hukum.
- Ø Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- Ø Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- Ø Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya :

- Ø Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan).
- Ø Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan.
- Ø Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang.
- Ø Menerima gratifikasi.

Dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu

untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

### 1.6.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UUTindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum,

terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

#### 1.7 Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 55 KUHP.
  - (1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana :
    1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
    2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
  - (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 56 KUHP.
  - (1) Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan :
    1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
    2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. Pleger  
Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.
2. Doen plegen  
Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.
3. Medpleger  
Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtige.
4. Uitlokker  
Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.<sup>5</sup>

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat di jelaskan bahwa seseorang adalah medeplichtig, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP.

---

<sup>5</sup>R. Soesilo, KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1973, hal

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.

#### 1.8 Pengertian Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya juga dapat kita artikan sebagai suatu hal sebagai ciri khas untuk membedakan antara kelompok atau suku yang satu dengan suku yang lain. Di mana dalam hal ini budaya dapat di bedakan menurut aturan, bahasa, ciri lain seperti bentuk rumah, lagu, bahkan tarian.



### 1.8.1 Budaya Korupsi

Indonesia adalah negara besar dan kaya akan nilai-nilai sejarah serta hasil alamnya. Indonesia mempunyai banyak sekali cerita sejarah, dikarenakan pada zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan besar. Begitu pula dengan praktek korup yang ada, dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan era demokrasi sekarang praktek-praktek korup telah banyak terjadi dan mengalami banyak sekali peningkatan karena berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini pula yang membuat praktek-praktek korupsi semakin susah untuk diberantas.

### 1.8.2 Sejarah Perkembangan Korupsi

#### a) Pada Zaman Kerajaan

Pada zaman kerajaan praktek korupsi hanya terjadi pada perebutan kekuasaan dimana hal ini juga dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga serta untuk memperluas wilayah kekuasaannya.

#### b) Pada Era Indonesia Merdeka

Pada era setelah Indonesia merdeka. Di dalam era tersebut yang masih di bawah pimpinan presiden Ir. Soekarno terlihat jelas bahwa telah dua kali dibentuk Badan Pemberantas Korupsi yaitu Parak dan Operasi Budhi. Kedua badan tersebut dibentuk untuk mengawasi praktek-praktek korupsi yang

terjadi pada era tersebut dimana salah satunya dengan cara mengisi formulir yang zaman sekarang dikenal dengan daftar kekayaan pejabat negara. Sedangkan Operasi Budhi sendiri kebanyakan bergerak di perusahaan-perusahaan negara yang dimana dianggap rawan akan praktek korupsi.

c) Pada Era Orde Baru

Pada masa orde baru sendiri juga terlihat akan adanya praktek-praktek korupsi dengan dibentuknya suatu badan khusus yang menangani akan hal ini, yaitu komite empat dan juga Opstib (Operasi tertib).

d) Pada Era Reformasi

Di dalam orde reformasi praktek korupsi telah menjalar kemana-mana seperti virus yang menjangkit seluruh elemen penyelenggara negara. Pada orde tersebut pimpinan negara Indonesia adalah Presiden BJ Habibie. Pada waktu kepemimpinannya Presiden membuat suatu rumusan undang-undang yaitu Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan juga pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Serta dilanjutkan juga oleh presiden selanjutnya yaitu Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

e) Pada Era Demokrasi

Beralih ke zaman sekarang, yaitu Demokrasi adanya badan yang mengurus tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimana telah kita ketahui yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana KPK di bantu oleh lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesi dalam misi pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tugas dan wewenang KPK telah terurai jelas di dalam Undang-undang No.30 tahun 2002.

### 1.8.3 Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi di Indonesia

Setiap apa pun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk. Dan ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain. Di kaitkan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara.

Seiring berkembangnya system teknologi di negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya

korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri.

Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hokum khususnya dibidang korupsi, yaitu Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai public dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya member upeti,

permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum<sup>6</sup>.

Adapun Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
3. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
5. Kemiskinan yang bersifat structural.
6. Sanksi hukum yang lemah.
7. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan yang lunak.
9. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
10. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Surachmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal - 106

<sup>7</sup> Ibid, hal - 107

### 1.9 Upaya Penanggulangan Korupsi

Semakin maraknya praktek Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak membuat para aparat penegak hukum diam dan tidak mengambil tindakan. Para aparat penegak hukum khususnya dibidang pemberantasan korupsi pun mulai resah dengan keluhan dari masyarakat yang terus menerus mengkritik kinerja mereka. Akan tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan para koruptur, mereka merasa senang dan semakin menjadi-jadi.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal memberantas atau menanggulangi Tindak pidana korupsi tersebut, dengan dibentuknya suatu badan khusus dimana badan tersebut berdiri sendiri tanpa di ada inplementasi dari lembaga lain. Akan tetapi lembaga tersebut mendapatkan bantuan langsung dari lembaga-lembaga hukum lain yang ada di Republik Indonesia.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga yang di bentuk khusus dalam menangani Tindak pidana korupsi. Dengan mempunyai hak khusus dalam setiap penyidikannya dimana hal-hal tersebut sangat membantu dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK.

Dalam hal pemberantasan korupsi bukan hanya penanggulangan atau pencegahan yang dilakukan pemerintah dengan sendirinya, akan tetapi badan perserikatan bangsa-bangsa yaitu PBB juga mengajak seluruh bangsa untuk memerangi tindakan korupsi yang disebut dengan United

Nations Convention Against Corruption, 2003(Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi). Sangat banyak keuntungan yang didapat Indonesia dari konvensi tersebut salah satunya untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional seperti yang tercantum pada penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003. Ada juga arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut :

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam meningkatkan kerja sama yang baik.
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.
4. Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

### 1.10 Dampak Korupsi

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika didalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.

Menurut Evi Hartanti dampak dari korupsi sebagai berikut :

#### a) Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama di bidang pliti, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara yang stabilitas polituk.



b) Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah dan menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

c) Menyusutnya Pendapatan Negara

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sector, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah pada sector-sektor penerimaan tersebut.

d) Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara

Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

e) Perusakan Mental Pribadi

Seserang yang sering melakukan penyelewengan dan penyelundupan mentalnya akan menjadi rusak. Ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung berdasarkan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru dan dicontoh oleh generasi muda Indonesia.

f) Hukum Tidak Lagi Dihormati

Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat<sup>8</sup>.

### 1.11 Macam-macam Tipe Tindak Pidana Korupsi.

#### 1. Tipe tindak pidana yang merugikan keuangan Negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal - 85

<sup>9</sup> Ibid, hal - 63

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan pasal-pasal:

Pasal 2, 3, 7 ayat (1) huruf a dan c, pasal 7 ayat (2), pasal 8,9, 10 huruf (a), pasal 12 huruf (i), pasal 12A, pasal 17. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No.20 Tahun 2001.

## 2. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Suap”

Pada tipe tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.<sup>10</sup>

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” Karen dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara

---

<sup>10</sup> Ibid, hal - 67

langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” Karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang atau pun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akan didakwa atau dijerat dengan pasal-pasal :

Pasal 5, 6, 11, pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, pasal 12A, dan pasal 17. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### 3. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.<sup>11</sup>

Dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :

---

<sup>11</sup> Ibid, hal - 72

Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, pasal 12A dan, pasal 17.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001.

#### 4. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan”

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pada tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana tersebut akan dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :

Pasal 12 huruf h, dan pasal 17 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 5. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut

---

<sup>12</sup> Ibid, hal - 74

dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.<sup>13</sup>

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam pasal 12B. Pelaku dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :

Pasal 12B juncto pasal 12C, pasal 13, pasal 17 undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 6. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan”

Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan” dilakukan masih atau sebatas percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan permufakatan” pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 : “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya”.<sup>14</sup>

Pelaku pada tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan permufakatan” dapat dijatuhi hukuman serta dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :

Pasal 7 ayat (1) huruf b, 7 ayat (1) huruf d, pasal 8, pasal 10 huruf b, pasal 15, 16, dan pasal 17. Undang-undang No. 31 Tahun 1999

---

<sup>13</sup> Ibid, hal - 75

<sup>14</sup> Ibid, hal - 78

Jo undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 7. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Lainnya”

Tindak pidana korupsi “lainnya” adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana.<sup>15</sup>

Dalam tindak pidana korupsi “lainnya” tersebut para pelaku dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal sebaga berikut:

Pasal 21, 22, 23, dan pasal 24.

#### 1.12 Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

pemerintah juga telah membuat suatu system peradilan khusus, dimana system peradilan tersebut berbeda dengan system peradilan pada umumnya.

Berdasarkan putusan mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Pengadilan tindak pidana korupsi paling lambat harus sudah terbentuk dengan berdasarkan undang-undang pada tanggal 19 Desember 2009, tetapi kemudian pemerintah pada tanggal 30 Oktober 2009 telang mengundang UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).<sup>16</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berwenang memeriksa, mengadili, Memutus perkara :

- a. Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud oleh UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>15</sup> Ibid, hal - 81

<sup>16</sup> Ibid , hal - 332

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- b. Tindak Pidana Pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate crime) adalah tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UURI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan UURI No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).
- c. Tindak Pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

#### 1.13 Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu komisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Tertulis dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pasal 3 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa “komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun”. Tujuan pemerintah membentuk KPK sendiri agar meminimalisir akan adanya tindak pidana korupsi. Hal tersebut tertulis dalam UU No. 30 Tahun 2002 pasal 4 “komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal - 336



Selain itu KPK juga mempunyai tugas, wewenang, serta kewajiban sebagaimana telah tertulis di dalam pasal 6 UU No.30 Tahun 2002, sebagai berikut :

- a. Kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindal pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;dan
- e. Melakukan monitor tesrhadap penyelenggara pemerintahan negara.

#### 1.14 Metode Penelitian

##### 1.14.1 Pendekatan Masalah

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi tersebut adalah penelitian yang menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat,<sup>18</sup> yang kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada agar dapat di tarik suatu kesimpulan yang logis. Empiris sendiri berasal dari kata empiris yang artinya berdasarkan

---

<sup>18</sup> H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 30

pengalaman atau empirisme yang artinya adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan pendapatan dalam praktek dan tidak perlu mempelajari teori.

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang diatur sesuai dengan UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta didukung juga oleh UU RI No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

#### 1.14.2 Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti,<sup>19</sup> dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 106

dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

### 1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah literatur, pendapat para ahli, data-data dari internet, jurnal-jurnal.

### 2. Bahan Hukum Sekunder.

- a) Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 jo No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-undang Republik Indonesia No.30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

#### 1.14.3 Pengumpulan Bahan atau Data

Untuk mengkaji suatu bahan atau data yang kita dapat baik dari buku atau pendapat para ahli serta internet sangat berbeda dengan pengumpulan bahan atau data dari ilmu lain. Dalam penelitian ilmu hukum Empiris untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Empiris adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait dimana bahan-bahan tersebut akan ditambahkan dengan pendapat para ahli.

#### 1.14.4 Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek

dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yang kasus tindak pidana perdagangan anak. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.

#### 1.15 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut. Dimana dalam sistematika penulisan tersebut terdiri dari empat Bab, yaitu :

Pada Bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis.

Berikutnya, pada Bab kedua ini adalah ulasan dari rumusan masalah pertama yang berisi tentang analisis mengenai Apakah faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kasus korupsi di Pengadilan tindak

pidana korupsi. Pada bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu pertama faktor internal, kedua faktor eksternal, ketiga macam tindak pidana korupsi yang telah ditangani yang dilaitkan pada rumusan masalah dan pembahasan di bab kedua tersebut.

Pada Bab ketiga adalah ulasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu Apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada bab ketiga tersebut terdiri dari tiga sub bab. Pada bab pertama yaitu bagaimana penerapan hukum bagi pelaku korupsi, sub bab kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, sub bab ketiga macam sanksi yang diberikan hakim bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pada Bab keempat berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Pada Bab keempat ini menyimpulkan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi tersebut dan telah dibahas, dan berisi rekomendasi yang telah dipaparkan dalam bentuk saran.